

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Setelah reformasi, hal yang diharapkan oleh masyarakat terhadap pemerintah adalah sebuah bentuk dalam pengalokasian anggaran pada tata kelola pemerintahan yang baik atau *good governance* yang dibarengi dengan transparansi serta akuntabilitas di setiap praktiknya. Salah satu cara untuk melihat hasil kegiatan yang berhubungan dengan keuangan daerah adalah dengan melihat *output* pada laporan keuangan pemerintah daerah (LKPD) (Abiyoso, 2021). Pemerintah daerah setempat harus memperhatikan informasi yang disajikan pada laporan keuangannya untuk digunakan dalam keperluan perencanaan, pengendalian, dan pengambilan keputusan (Yuliani & Agustin, 2021). Laporan keuangan saat ini diibaratkan sebagai suatu media pertanggungjawaban dan patokan atas kinerja keuangan manajemen dalam sebuah system pemerintah daerah kepada publik yang dipercayakan kepadanya (Fathia *et al.*, 2020). Penggunaan teori *Stewardship* dalam pemerintah daerah merupakan suatu pandangan baru mengenai cara mengelola organisasi yang nantinya diharapkan dapat mengatasi isu-isu yang berkaitan dengan *government governance* dan *good government governance* untuk kepentingan suatu organisasi pemerintahan (Pasaloran, 2001).

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 mengenai Standar Akuntansi Pemerintah (SAP) dijelaskan bahwa laporan keuangan merupakan laporan yang terstruktur yang berisi tentang posisi keuangan dan transaksi-transaksi yang dilakukan oleh suatu entitas pelaporan, sehingga wajib terdapat unsur-unsur yang terkandung dalam empat prasyarat normatif kualitatif

laporan keuangan yang terdiri dari relevan, andal, dapat dibandingkan, dan dapat dipahami. Komponen yang terdapat di dalam laporan keuangan berbasis akrual sebagai berikut: (1) laporan realisasi anggaran, (2) laporan perubahan saldo anggaran lebih, (3) laporan oprasional, (4) laporan perubahan ekuitas, (5) neraca, (6) laporan arus kas, (7) catatan atas laporan keuangan. Laporan tersebut dihasilkan melalui berbagai aktivitas entitas yang mencerminkan kinerja keuangan selama satu periode (PP 71 Tahun 2010). Menurut UU No. 15 tahun 2004, pada setiap tahunnya laporan keuangan pemerintah pusat bahkan daerah memperoleh penilaian berupa opini atas kewajaran informasi pengelolaan keuangannya dari Badan Pengawas Keuangan (BPK). Dalam hal tersebut, BPK memberi empat jenis opini, yaitu Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP), Opini Wajar Dengan Pengecualian (WDP), Opini Tidak Wajar (TW) dan Tidak Memberikan Pendapat (TMP).

Opini yang diberikan oleh BPK tentunya didahului dengan pertimbangan beberapa kriteria yang terdiri dari kesesuaian dengan Standar Akuntansi Pemerintahan, efektivitas pengendalian internal, kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, dan kecukupan pengungkapan (Wardani & Andriyani 2017). Dengan opini WTP yang didapatkan oleh suatu LKPD, hal tersebut membuktikan akuntabilitas semakin baik dan terlaksananya *good government governance*. Sedangkan peraihan opini WDP menunjukkan akuntabilitas yang rendah dan tidak terlaksananya *good government governance* (Masnun, 2018).

Menurut Data Laporan Kinerja BPK Perwakilan Provinsi Jawa Timur tahun 2022, Kualitas Laporan keuangan di Jawa Timur memperoleh nilai sebesar 87,79 dengan predikat (memuaskan). Tetapi, masih terdapat beberapa evaluasi yang menjadi fokus dan secepatnya dilakukan perbaikan. Rekapitulasi Hasil

Pemeriksaan BPK DTT tahun 2022 semester II mengenai Kepatuhan pada Pemerintah Daerah dan BUMD memperlihatkan hasil yang membuktikan bahwa masih terdapat permasalahan penyimpangan yang sering terjadi dalam pelaporan keuangan pemerintah daerah. Secara menyeluruh hasil pemeriksaan tentang pengelolaan belanja daerah mengungkapkan ada sebanyak 1959 permasalahan. Hal tersebut dimuat dalam tabel berikut.

Tabel 1.1
Hasil Pemeriksaan Keuangan Pada Pemerintah Daerah (Nilai dalam Juta)

Kelemahan Sistem Pengendalian	Ketidakpatuhan Terhadap Ketentuan Peraturan Dan Undang-Undang		Efektivitas, Ekonomis, Efisiensi	
Jumlah Permasalahan	Jumlah Permasalahan	Nilai temuan	Jumlah Permasalahan	Nilai Temuan
678	1229	699961,35	52	117251,14

Sumber : www.bpk.go.id– IHPS II Tahun 2022

Kabupaten Bangkalan merupakan salah satu kabupaten di Jawa Timur yang sejak tahun 2017 sampai tahun 2022 telah memperoleh predikat opini WTP enam kali berturut-turut terhadap LKPDnya, hal tersebut menunjukkan bahwa penerapan *good governance* sudah berjalan dengan baik. Namun, perolehan opini WTP pada LKPD belum menjadi jaminan suatu kabupaten terbebas dari temuan dan kesalahan. Selain itu, menurut IHPS II Tahun 2022 BPK perwakilan Jawa Timur juga menjelaskan beberapa temuan dalam Pemerintahan Kabupaten Bangkalan, yang diakibatkan oleh kurang optimalnya pengawasan serta sistem pengendalian internal, transparansi publik dan kurangnya koordinasi Pejabat Pembuat Komitmen (P2K) dan PPTK di Kabupaten Bangkalan dalam menyusun suatu laporan keuangan.

Selain kasus diatas, dalam penelitian Mokoginta et al (2019) di tahun 2016 dilatar belakangi hasil temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) diraih Opini

Wajar Dengan Pengecualian terhadap laporan keuangan pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow Utara, hal tersebut terjadi karena lemahnya pengendalian internal dan masalah lain seperti, kurangnya pemahaman mengenai penyajian dan penyusunan laporan keuangan yang akuntabel, pejabat pengelola keuangan dalam OPD belum maksimal untuk memahami tugas dan fungsinya masing-masing, selain itu juga masih terdapat rendahnya kualitas penyusunan pelaporan keuangan dan administrasi pengelolaan asset pada setiap OPD.

Fenomena-fenomena pelaporan keuangan pemerintah dan terjadinya penyimpangan-penyimpangan yang berhasil ditemukan oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) saat pelaksanaan audit laporan pemeriksaan masih sering terjadi akibat kurangnya pengendalian internal serta kecermatan penyajian pelaporan keuangan oleh pejabat pelaksana di dalamnya. Selain itu, belum sepenuhnya paham mengenai ketentuan dan kebijakan dalam penyusunan pelaporan keuangan, belum optimalnya pengawasan dan pengendalian, masih kurangnya transparansi dan koordinasi membuat pemerintahan pusat maupun beberapa daerah di Indonesia masih memperoleh opini WDP, dan WTP dengan catatan yang memuat beberapa temuan dari BPK atas kualitas laporan keuangannya. Menguatnya tuntutan transparansi informasi dan akuntabilitas publik seiring berjalannya proses pembangunan pemerintahan pusat dan daerah yang lebih baik berbanding terbalik dengan fakta yang terjadi dilapangan karena masih banyaknya catatan temuan dan penyimpangan yang terjadi di dalamnya (Utami, 2021).

Sistem pengendalian internal diperlukan dalam menjaga kualitas laporan keuangan. Peluang adanya temuan akibat lemahnya sistem pengendalian internal pemerintah dan kurangnya kecermatan dalam penyusunan laporan

keuangan yang dilakukan oleh pengelola keuangan suatu OPD dimungkinkan dapat terjadi Anggraini (2021). Pada tingkatan organisasi, tujuan pengendalian intern berkaitan dengan keandalan laporan keuangan, umpan balik yang tepat waktu terhadap pencapaian tujuan-tujuan operasional dan strategis, serta kepatuhan pada hukum (Maksyur 2020). Penelitian yang dilakukan Firmansyah & Sinambela (2020), Anggraini (2021), Maksyur (2020), Rahmawati *et al* (2018) dan Puspita & Ariani (2023) membuktikan bahwa pengendalian Internal terbukti positif berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan karena dapat memberikan gambaran yang lebih jelas dan membantu membuat keputusan yang tepat, serta meminimalkan korupsi. Namun sebaliknya, penelitian yang dilakukan Mukarromah (2021), Gustina (2021), Purba *et al* (2021) menyatakan bahwa Sistem Pengendalian Internal berpengaruh negatif dan signifikan terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah.

Sistem akuntansi keuangan daerah dapat memberikan *output* data seperti Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (Mokoginta *et. al*, 2019). Sistem akuntansi memberikan pengetahuan mengenai pengolahan informasi dalam akuntansi, ketentuan serta kebijakan dalam penyusunan laporan keuangannya, dimulai saat data direkam dalam dokumen hingga menjadi laporan (Mukarromah, 2021). Pembuat laporan keuangan harus memiliki pemahaman sistem akuntansi keuangan daerah yang meliputi pemahaman terkait sistem dan prosedur akuntansi penerimaan kas, pengeluaran kas, aset dan selain kas (Saputra, 2021). Sistem akuntansi keuangan daerah ikut andil menjadi peran penting dalam pengelolaan keuangan daerah supaya terarah dan berjalan sebagaimana semestinya (Gustina 2021). Penelitian yang dilakukan oleh Gustina (2021), Saputra (2021), Mokoginta *et al*, (2019) dan Mukarromah (2021) membuktikan

bahwa sistem akuntansi keuangan daerah berpengaruh positif signifikan terhadap kualitas laporan keuangan. Sebaliknya pada penelitian yang dilakukan oleh Yuriana (2022), Indrayani (2018), Suhardjo (2019) dan Mustika (2020) menunjukkan bahwa penerapan sistem akuntansi keuangan daerah pada suatu satuan kerja tidak berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah.

Pemanfaatan teknologi informasi di era modern saat ini menjadi sebuah keharusan (Wardani & Andriyani, 2017). Teknologi informasi memudahkan sumber daya manusia mengelola keuangan & memenuhi tuntutan masyarakat mengenai transparansi dan akuntabilitas publik (Puspita & Ariani, 2023). Walaupun laporan keuangan merupakan suatu produk yang dilakukan oleh sumber daya manusia dibidang akuntansi, tapi memanfaatkan teknologi rupanya dapat meminimalkan kesalahan yang terjadi (Zubaidi *et al*, 2020). Peraturan Pemerintah No. 56 Tahun 2005 mengenai Sistem Informasi Keuangan juga menjelaskan bahwa guna menindaklanjuti terselenggaranya suatu proses pembangunan yang sama dengan diharuskan untuk melakukan pengembangan dan pemanfaatan kemajuan teknologi informasi guna meningkatkan kemampuan dalam mengelola keuangan, serta menyalurkan informasi keuangan kepada pelayanan publik. Penggunaan SIPKD (Sistem Informasi Pengelola Keuangan Daerah) memudahkan setiap OPD dalam menyajikan pelaporan keuangan yang telah sesuai dengan standar akuntansi pemerintahan yang berlaku, tentunya tidak luput dari penyajian akuntabilitas dan transparansi dalam penyajian laporan keuangan, hal tersebut dapat tersalurkan melalui pemanfaatan teknologi informasi (Saputra, 2021).

Penelitian yang dilakukan oleh Mene *et al.* (2018), Puspita & Ariani (2023), Zubaidi *et al* (2020), Saputra (2021), dan Wardani & Andriyani (2017) membuktikan Pemanfaatan Teknologi Informasi berpengaruh positif terhadap Kualitas laporan Keuangan dimana semakin baik pemanfaatan teknologi informasi pada suatu satuan kerja, maka akan semakin baik pula kualitas pelaporan keuangan pemerintah daerah yang dihasilkan. Selain itu, teknologi informasi juga penting dalam peningkatan kualitas laporan keuangan pemerintah daerah pada Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD). Namun sebaliknya penelitian lain yang dilakukan oleh Olla (2021), Sakinah (2019), Arif (2020), dan Triwahyudi (2020) membuktikan bahwa pemanfaatan teknologi informasi tidak berpengaruh signifikan terhadap kualitas laporan keuangan.

Penelitian yang dilakukan penulis merupakan replikasi dari penelitian yang dilakukan oleh Gustina (2021) dengan tujuan mengetahui pengaruh dari sistem pengendalian internal dan penerapan sistem akuntansi keuangan daerah terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah Kabupaten Indragiri Hilir. Penelitian ini menarik untuk diteliti karena ditemukan GAP Research dari penelitian terdahulu sehingga perlu untuk diteliti kembali. Adapun perbedaan dengan penelitian sebelumnya yakni berupa penambahan variable Pemanfaatan Teknologi Informasi, dengan maksud untuk menemukan sejauh mana pengaruh sistem pengendalian internal (SPI), sistem akuntansi keuangan daerah (SAKD) dan pemanfaatan teknologi informasi yang diterapkan terhadap kualitas laporan keuangan pada pemerintah daerah di kota asal penulis yang menjadi fokus penelitian, yang mana pada LKPD Kab. Bangkalan masih saja ditemukan temuan walaupun telah mendapat opini WTP enam kali berturut-turut sejak 2017-2023

dengan tujuan dan harapan agar pemerintah dapat mempertahankan opini WTP BPK dan mencegah bertambahnya dan adanya temuan di periode selanjutnya.

1.2. Rumusan Masalah

Bersumber dari uraian masalah yang sudah dipaparkan sebelumnya, maka rumusan masalah penelitian sebagai berikut:

1. Apakah sistem pengendalian internal berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah?
2. Apakah sistem akuntansi keuangan daerah berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah?
3. Apakah pemanfaatan teknologi informasi berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah?

1.3. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang sudah dipaparkan, penulis membuat tujuan penelitian sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui pengaruh sistem pengendalian internal terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah.
2. Untuk mengetahui pengaruh sistem akuntansi keuangan daerah terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah.
3. Untuk mengetahui pengaruh pemanfaatan teknologi informasi terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah.

1.4. Manfaat Penelitian

1. Bagi Pemerintahan Daerah

Diharapkan bisa menjadi bahan pertimbangan dan evaluasi bagi pemerintah seberapa penting sistem pengendalian internal, sistem akuntansi keuangan

daerah dan pemanfaatan teknologi informasi berpengaruh signifikan terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah Kab. Bangkalan.

2. Bagi Aparatur Daerah

Manfaat penelitian ini bagi aparatur daerah adalah sebagai koreksi dan evaluasi mengenai sistem pengendalian internal, sistem akuntansi keuangan daerah dan pemanfaatan teknologi informasi berpengaruh signifikan terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah Kab. Bangkalan.

3. Bagi Pihak Lain

Manfaat penelitian ini bagi penulis adalah untuk menambah wawasan mengenai sistem pengendalian internal, sistem akuntansi keuangan daerah dan pemanfaatan teknologi informasi berpengaruh signifikan terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah Kab. Bangkalan.

4. Bagi Penelitian Selanjutnya

Hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai pedoman dan referensi untuk penelitian selanjutnya mengenai sistem pengendalian internal, sistem akuntansi keuangan daerah dan pemanfaatan teknologi informasi berpengaruh signifikan terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah.